

OPINI PUBLIK

Bukti Komitmen Akuntabilitas Serta Transparansi, Rutan Kudus Ikuti Meeting Dengan BPK RI

David Fernanda Putra - KUDUS.OPINIPUBLIK.ID

Jan 25, 2024 - 00:53

The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a presentation slide titled "1. Kebijakan Partisipasi Masyarakat Melalui SKM dan FKP" (Community Participation Policy Through SKM and FKP). The slide features the logos of PANRB and BerAKHLAK. It includes a diagram with a central box labeled "Kebijakan Pelayanan Inovasi" (Innovative Service Policy) and arrows pointing to "Pelaksanaan SKM dan FKP" (Implementation of SKM and FKP) on the left and "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" (Improvement of Public Service Quality) on the right. The implementation section lists three bullet points: "Mengetahui titik lemah dan kekuatan pelayanan" (Identify service weaknesses and strengths), "Mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah" (Encourage community participation in evaluating government performance), and "Meyakinkan model pelayanan yang sesuai kebutuhan" (Ensure service models meet needs). The presentation is on "Slide 6 of 16". The Zoom interface includes a top bar with "Rekaman" (Recording) and "Anda sedang melihat layar TATA LAKSANA - BIRO PERENCANAAN..." (You are viewing the screen of TATA LAKSANA - BIRO PERENCANAAN...). A sidebar on the right shows a list of participants, including "RUTAN KUDUS_KAN...", "Rutan Rempang_Lola", and "Kepri Rutan Tanjung...". The bottom toolbar contains icons for "Bunyikan" (Mute), "Hentikan Video" (Stop Video), "Bagikan Layar" (Share Screen), "Ringkasan" (Summary), "AI Companion", "Aplikasi" (App), "Papan Tulis" (Whiteboard), "Catatan" (Notes), "Lainnya" (More), and "Keluar" (Leave).

Kudus - Rutan Kudus membuktikan komitmennya terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dengan aktif berpartisipasi dalam entry meeting yang diinisiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai bagian dari pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Rabu (24/01).

Melalui kolaborasi dengan BPK RI, lembaga pemasyarakatan ini tidak hanya menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

Riza sebagai Kepala Pengelolaan Kudus menyatakan bahwa entry meeting ini sebagai wujud nyata terhadap ketaatan dalam pengelolaan keuangan.

"Kami melihat entry meeting ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola keuangan kami. Kami siap menjawab setiap pertanyaan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memastikan segala proses keuangan Rutan Kudus berada pada tingkat transparansi tertinggi," ungkap Riza

Keterlibatan Rutan Kudus dalam proses pemeriksaan keuangan tahun 2023 ini memberikan sinyal positif terkait dengan komitmen lembaga pemasyarakatan tersebut untuk menjalankan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat akan akuntabilitasnya.